



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MIHARJO
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 71350

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 820.000.000

1. Tanah Seluas 250 m2 di PONTIANAK, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 241 m2/176 m2 di PONTIANAK, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 451 m2/9 m2 di KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 191.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO NC1 1A3C Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOBIL, HONDA CRV HHR-V RU1 1,5SCVT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOP METIC PRESTICE Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 102.300.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 5.781.198

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 1.119.081.198

III. HUTANG Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.119.081.198

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AKHMAD FAKHRIZAL NUR
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 129232

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 535.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 196 m2/78 m2 di KAB / KOTA KAPUAS, HASIL SENDIRI Rp. 340.000.000
2. Tanah Seluas 20.000 m2 di KAB / KOTA KAPUAS, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
3. Tanah Seluas 280 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 215.000.000

1. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 15.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 6.810.699

F. HARTA LAINNYA Rp. 190.000.000

Sub Total Rp. 961.810.699

III. HUTANG Rp. 778.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 183.810.699

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HUSNI
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
3. NHK : 1013554

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	300.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , LAINNYA	Rp.	300.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	40.000.000
1. MOBIL, TOYOTA SEDAN Tahun 2017, HASIL SENDIRI	Rp.	40.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	10.002.200
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	350.502.200

III. HUTANG Rp. 607.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. -256.497.800

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : Priyo Budi Admoko
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 198739

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	395.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 40 m2/40 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI	Rp.	395.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	6.300.000
1. MOTOR, Honda ACH1M1B04 A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI	Rp.	6.300.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	34.405.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	39.814.274
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	475.519.274

III. HUTANG Rp. 365.586.535

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 109.932.739

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JUDIN
2. Jabatan : PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN
3. NHK : 446795

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 200.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 495 m2/90 m2 di KOTA PALANGKA RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 104.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU/SIGRA 1.2 RM B401RS-GMZFJ / MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 2.500.000

D. SURAT BERTAGIH Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 700.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 307.200.000

III. HUTANG Rp. 240.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 67.200.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

